

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Memulai Perjalanan

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional demi melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2005). Adanya sebuah buku yang ditulis oleh Aditjondro sempat menggemparkan Indonesia dengan sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa saat partai politik berhasil menduduki kursi dewan dan memiliki kekuasaan, mereka dengan mudahnya memanfaatkan dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Partai politik adalah institusi publik yang seharusnya terbuka dalam menjalankan kebijakan. Akan tetapi, gambaran di lapangan, partai politik seakan menjelma menjadi lembaga privat, tidak terkontrol, kurang mencitrakan diri sebagai wakil publik. Akses publik terhadap partai politik juga sangat dibatasi, misalnya terkait akses terhadap laporan keuangan dan akses dalam memengaruhi kebijakan partai (Harian Kompas, Rabu, 10 April 2013).

Penelitian dari Emmy (2008) mengungkapkan partai politik di tingkat pusat memiliki tingkat kepatuhan yang sangat rendah terhadap kewajiban menyajikan laporan keuangan partai politik yang baik dan benar, sehingga akuntabilitas partai politik di tingkat pusat menjadi rendah. Peneliti ICW Abdullah Dahlan juga menyatakan bahwa Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana parpol sangat mutlak untuk diterapkan, mengingat parpol mendapatkan dana dari anggaran pemerintah yang bersumber dari rakyat.

Keterbukaan penting menurut Abdullah, mengingat adanya keinginan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dan Kementerian Dalam Negeri untuk menggelontorkan bantuan dana senilai hingga Rp1 triliun untuk setiap parpol. Singkatnya, parpol harus memberikan informasi secara lengkap, jangan sampai kalah dengan pengelolaan masjid yang diumumkan secara terbuka kepada publik setiap pekan. Mietzner (2013) juga memberikan isyarat, subsidi Negara yang memadai untuk pengelolaan parpol merupakan kemungkinan yang bisa menjadikan parpol lebih baik.

Harian Kompas (Kamis, 15 April 2010), mencatat salah satu konspirasi yang berkedok motif pribadi adalah kebutuhan partai akan dana besar yang memiliki tujuan untuk memenangkan pemilu telah mendorong para politisi untuk berlaku koruptif. Senada dengan pernyataan di atas, riset yang dilakukan Perludem memaparkan bahwa bantuan pemerintah tidak lebih dari 1,3 persen dari seluruh biaya yang diperlukan partai dalam mengelola organisasi setiap tahun. Karena itulah, pendanaan parpol merupakan wilayah yang gelap. Dalam prakteknya di lapangan, hal ini ditandai dengan banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi.

Skandal M. Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat, menyeret beberapa mantan petinggi Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, ada aliran dana Rp 100 miliar dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada Mei 2010. Lebih lanjut Kompas memberitakan bahwa, senada dengan Nazaruddin, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa waktu lalu,

mengatakan, dia pernah membawa uang sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke kongres Partai Demokrat di Bandung.

Contoh skandal-skandal di atas membuktikan bahwa masih banyak nama-nama politisi yang masuk dalam pusaran hitam dan harus berujung dengan merasakan dinginnya sel bui penjara. Menurut Junaidi, dkk (2011:1), potret sisi suram kondisi keuangan parpol yang mulai semrawut dan tertutup, tidak boleh menjadi norma dan praktek dalam tata kelola keuangannya.

Dalam memperbaiki kondisi tersebut penelitian dari Kholmi (2013) mengatakan bahwa pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partainya, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD.

Jika ranah penelitian sebelumnya berada pada *scope* tingkat kepatuhan kewajiban parpol dalam menyajikan laporan keuangan, maka hasrat yang berkecamuk dalam diri peneliti lebih mengarah pada pengelolaan keuangan partai. Tema penelitian ini sangat penting untuk digali lebih dalam, karena sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak partai politik yang belum mengungkapkan, bagaimana mereka mengelola dana keuangan mulai dari sumber penerimaan, aktifitas pengeluaran hingga pelaporan keuangan.

Perspektif dari narasumber yang sudah lama berkecimpung dalam mengelola keuangan partai menjadi sorotan utama yang tak luput dari kacamata publik. Berangkat dari titik permasalahan yang telah dipaparkan di atas, publik akan mengetahui, bagaimana pengelolaan keuangan dari sebuah partai politik yang senyatanya.

1.2 Sebuah Pertanyaan Dalam Benak

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, dapat membuktikan bahwa adanya sisi suram kondisi keuangan parpol yang mulai semrawut dan tertutup serta beberapa masalah kepartaian yang menyeret beberapa pelaku politisi kepada tindak pidana korupsi, memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah partai politik dalam mengelola keuangan, mulai dari penerimaan, aktifitas pengeluaran hingga pelaporan keuangannya?

Pertanyaan ini penting dan perlu untuk diajukan, guna untuk mendapatkan jawaban dari perspektif para narasumber penelitian yang mengetahui, mengerti dan memahami setiap jengkal dan seluk-beluk dari pengelolaan keuangan parpol. Penting juga ditegaskan dalam penelitian ini, bahwa fenomena yang coba untuk diungkap oleh peneliti tidak dapat dikategorikan tindakan melanggar dan atau melawan hukum, karena ini tidak menjadi topik dari pembahasan penelitian ini. Peneliti mengakui bahwa tidak memiliki kompetensi dalam berbicara di bidang ranah hukum.

1.3 Keinginan yang Akan Diwujudkan

Penelitian ini sengaja dilakukan oleh peneliti dengan harapan serta tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan keuangan parpol dalam praktik yang ada di lapangan. Pengungkapan fakta realitas penelitian ini berangkat dari pengelolaan keuangan partai politik yang selama ini terkesan seakan-akan ditutupi, dari sinilah penelitian ini menjadi penting untuk diungkap sebagai bahan pembelajaran.

Penelitian ini tidak ditujukan untuk menggeneralisir temuan penelitian, namun temuannya nanti dapat dijadikan referensi yang memiliki keterkaitan yang sama (pengelolaan keuangan partai politik) di tempat yang lain. Tempat serta ragamnya bisa jadi berbeda, namun secara substansi bisa saja serupa atau bahkan sama seluruhnya.

1.4 Pengharapan yang Ingin Diberikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yang bermanfaat di kalangan praktisi dan akademisi. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu: dapat menghasilkan realita yang relatif komperhensif dan menghasilkan *success of the target* berupa bukti empiris, terkait pengelolaan keuangan yang dikelola oleh para pemeran yang berkecimpung dalam partai politik.

Penelusuran yang mendalam terkait jejak pengelolaan keuangan partai politik, sepanjang pengetahuan penulis, masih jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Ikhtiar dalam menelusuri lorong-lorong demi menguak semua fenomena dalam ranah investigasi terkait pengelolaan keuangan partai politik, dilakukan peneliti, demi memberikan pencerahan bagaimana pengelolaan keuangan partai politik yang sebenar-benarnya kepada publik.